

Pengaruh *Blue Economy* dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di wilayah Pesisir Jawa Timur Tahun 2019-2024

Kirana Lintang Prameswari¹, Debby Nindya Istiandari²

^{1,2}Ilmu Ekonomi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: krlntngp@gmail.com, ² debbynindya@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: krlntngp@gmail.com

Abstrak– Kemiskinan di wilayah pesisir masih menjadi tantangan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 22 Kabupaten/Kota pesisir dengan garis pantai sepanjang 3.498,12 Km. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Timur periode 2019-2024. Masalah utama yang diteliti adalah tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan pesisir seperti Lekok (18,7%), Kraton (17,9%), dan Nguling (16,5%) meskipun memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Variabel yang dianalisis meliputi implementasi *blue economy*, tingkat penyerapan tenaga kerja di wilayah pesisir, dan persentase kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *blue economy* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi cuaca, pendidikan, dan infrastruktur.

Kata Kunci: Kemiskinan, *Blue Economy*, Penyerapan Tenaga Kerja, Wilayah Pesisir

Abstract–Poverty in coastal areas remains a major challenge in Indonesia, including in East Java Province, which has 22 coastal districts/cities with a coastline of 3,498.12 km. This study aims to analyze the impact of the blue economy and labor absorption on poverty levels in the coastal areas of East Java for the period 2019-2024. The main issue studied is the high poverty rate in several coastal subdistricts such as Lekok (18.7%), Kraton (17.9%), and Nguling (16.5%) despite their abundant marine and fishery resources. The research method used a quantitative approach with panel data analysis from the Central Statistics Agency (BPS) and the East Java Marine and Fisheries Service. The variables analyzed included the implementation of the blue economy, the level of labor absorption in coastal areas, and the poverty rate. The results of the study show that the implementation of the blue economy and increased employment in the marine sector did not have a significant effect on reducing poverty rates in coastal areas. This is due to several factors such as government policy, weather conditions, education, and infrastructure.

Keywords: Poverty, Blue Economy, Labor Absorption, Coastal Areas

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di setiap negara. Indonesia sebagai negara maritim juga masih mengalami permasalahan kemiskinan. Menurut Kementerian Keuangan RI tahun 2023, kemiskinan adalah kondisi dimana individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di kota dan di pedesaan saja tetapi di daerah pesisir juga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur di tahun 2024 terjadi penurunan. Meski dalam periode tahun 2019-2024 angka kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2020 persentase naik menjadi 11,09% kemudian di tahun 2021 naik menjadi 11,40%, kemiskinan dapat diturunkan hingga di tahun 2024 menjadi 9,79% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2019	10,37%
2020	11,09%
2021	11,40%
2022	10,30%
2023	10,35%
2024	9,79%

Sumber: Badan Pusat Statistik[1]

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan masih menjadi masalah di Provinsi Jawa Timur baik di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Wilayah pesisir Jawa Timur memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Daerah administratif mencakup 22 Kabupaten/Kota pesisir dengan total garis pantai sepanjang 3.498,12 Km. Luas wilayah pesisir ini serta didukung dengan adanya pelabuhan, sumber daya perikanan tangkap dan budidaya serta pariwisata bahari mendorong terjadinya perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu fenomena kemiskinan yang ada di pesisir Jawa Timur adalah wilayah pesisir Pasuruan seperti Lekok, Nguling dan Kraton yang masih terjebak dalam kemiskinan. Menurut BPS Kabupaten Pasuruan tahun 2023, tingkat kemiskinan di kecamatan pesisir masih tinggi seperti Lekok 18,7%, Kraton 17,9%, dan Nguling 16,5%.

Wilayah pesisir memiliki banyak sumber daya alam yang mampu mendorong perputaran ekonomi. Saat kegiatan perekonomian digerakkan oleh masyarakat sekitar maka tenaga kerja akan terserap dan penduduk yang memiliki pekerjaan akan bertambah. Penyerapan tenaga kerja merupakan diterimanya para pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya atau suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk diisi pencari pekerjaan (Todaro, dalam Julyandi, 2020). Sektor pariwisata, perikanan bahkan industri pelabuhan bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Semakin bertambah juga masyarakat yang memiliki pendapatan yang kemudian akan perlahan terlepas dari kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh pada kemiskinan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor IMK secara signifikan dapat menurunkan kemiskinan [3]. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Purwakarta [4]. Penelitian lain juga menunjukkan hasil bahwa program budidaya perikanan memberikan dampak positif seperti terciptanya pengusaha baru [5].

Konsep perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya laut biasa disebut dengan istilah *blue economy*. Pengertian *blue economy* adalah sistem perekonomian yang berdasar pada perlindungan sumber daya alam dan lingkungan [6]. Tujuan dari konsep ekonomi tersebut adalah menjamin tersedianya sumber daya alam berkelanjutan, kesehatan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien. *Blue economy* merupakan konsep mengoptimalkan sumber daya perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan inovatif yang tetap melindungi kelestarian dan industri berkelanjutan [7]. Potensi ini mampu membuka peluang pekerjaan dan sumber pendapatan masyarakat di sekitar. Dengan hal itu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir.

Selain itu, hasil dari perikanan tangkap Jawa Timur bermacam - macam. Di tahun 2022 Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan menjadi wilayah dengan komoditas hasil perikanan tangkap tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Jika dikalkulasikan periode tahun 2019 – 2024 semua volume hasil perikanan tangkap mengalami kenaikan setiap tahunnya, meski di tahun 2020 turun menjadi 419.909,44 ton kemudian naik perlahan hingga di 2024 naik menjadi 621.437,86 ton sebagaimana di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur

Tahun	Volume
2019	508.389,46 Ton
2020	419.909,44 Ton
2021	559.193,26 Ton
2022	586.138,56 Ton
2023	601.269,07 Ton
2024	621.437,86 Ton

Sumber: DKP Provinsi Jawa Timur[8]

Selain produk sumber daya alam, dalam *blue economy* juga terdapat sektor jasa yaitu pelabuhan. Di wilayah Jawa Timur memiliki total 52 pelabuhan, 22 pelabuhan diusahakan dan 30 pelabuhan tidak diusahakan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969, Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai kondisi dengan kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan menurut asas-asas/hukum perusahaan atas ketetapan menteri. Sedangkan, pelabuhan tidak diusahakan adalah pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan.

Dengan adanya pelabuhan yang ada, diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk bongkar muat barang, pelabuhan dapat digunakan sebagai penarik wisatawan untuk

berkunjung. Menurut Gubernur Jawa timur, Khofifah memaparkan bahwa wilayah Jawa timur memiliki 6 pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Teluk Lamong, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Kalianget, dan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo.

Menurut penelitian dengan judul Peran Inklusi Keuangan dalam Memediasi Pengaruh Ekonomi Kreatif dan Blue Economy terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Pesisir, Blue Economy berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Pesisir dilihat dari peningkatan pendapatan [9]. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa Nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Desa [10]. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga kerja juga menyimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan [4]. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan [11]. Penelitian di atas memperlihatkan kesenjangan sehingga memberikan gambaran yang tidak konsisten dalam konteks nusantara. Penelitian ini juga menggabungkan 2 variabel yaitu kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *blue economy* mampu memberikan peluang pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk keluar perlahan dari kemiskinan. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel konservasi, budidaya ikan, dan luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat [12]. Kesejahteraan masyarakat sangat penting karena bersinggungan langsung dengan pengurangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Timur tahun 2019 – 2024..

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian [13]. Variabel bebas pada penelitian ini adalah *blue economy* sebagai X1 dan penyerapan tenaga kerja sebagai X2, dengan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan sebagai Y. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur. beberapa di antaranya adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, dan daerah pesisir lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data tingkat kemiskinan, hasil perikanan, serta jumlah tingkat penyerapan angkatan kerja di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (DKP) kemudian didukung oleh jurnal penelitian lain yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari data sekunder resmi BPS, Publikasi pemerintah serta data dari instansi terkait lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan bantuan *software* SPSS menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan menggunakan regresi linier berganda, penelitian ini dapat menentukan apakah *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja berpartisipasi secara positif, negatif atau tidak signifikan pada upaya pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients		Standardized Coefficients		
		Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
1	(Constant)	36.704	22.548		1.628	.202
	X1	-.177	.189	-.498	-.94	.416
	X2	-2.361	4.875	-.256	-.484	.661

a. Dependent Variable:
Kemiskinan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X1 yaitu *blue economy* memiliki koefisien regresi sebesar -0,177 dengan nilai signifikansi sebesar 0,416 yang dapat disimpulkan bahwa *blue economy* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian, pada variabel X2 yaitu penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar -2,361 dengan nilai signifikansi sebesar 0,661 yang dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.807	2	.404	1.317	.398
	Residual	.919	3	.306		
	Total	1.727	5			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil uji F pada tabel anova di atas menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,389 yang dimana lebih besar dari 0,05 dengan nilai F sebesar 1,317. Artinya variabel *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijelaskan pada gambar tabel di atas.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
1	.684	.0467	.112	.55361

a. Predictors: (constant),X1,X2

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil tersebut juga menjelaskan bahwa 53,3% kemiskinan tidak dapat dijelaskan oleh variabel *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja. Terdapat faktor lain di luar variabel penelitian yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur.

3.2 Implementasi Hasil

Dari hasil pengujian data di atas terdapat beberapa faktor penyebab dapat berupa kebijakan pemerintah, pendidikan masyarakat setempat, infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir disebabkan oleh masalah alam dan lingkungan [14]. Kemudian, kebijakan pemerintah dengan pemberian subsidi dengan menyamaratakan perlakuan padahal karakteristik kemiskinan di wilayah pedesaan, perkotaan, pedesaan dan pegunungan berbeda-beda. Masalah individu nelayan, seperti saat mendapat bantuan berupa alat untuk mencari ikan, pada akhirnya akan dijual karena terdesak oleh kebutuhan. Hasil dari penelitian lain menyimpulkan bahwa terdapat 2 faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan dan keterampilan. Faktor eksternal meliputi musim, infrastruktur dan bantuan pemerintah yang kurang efektif [15]. Selain itu, hasil dari perikanan juga tidak selalu signifikan. Seperti penelitian terdahulu dengan kesimpulan bahwa, nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, dan nilai produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Desa [10]. Pada penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir juga disebabkan oleh rendahnya kreativitas usaha, dimana anak muda selepas sekolah memilih menjadi nelayan, tidak memiliki pandangan baru [16].

Meskipun sektor kelautan di Jawa Timur menunjukkan potensi yang besar, data-terbaru mengindikasikan bahwa manfaatnya belum cukup untuk mengangkat kemiskinan pesisir secara signifikan. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Muhammad Isa Ansori, sektor rumput laut menyumbang 52,88% dari total produksi perikanan budidaya di Jatim dengan produksi sekitar 699.236 ton, namun dari potensi lahan seluas 397.286 hektare, yang dimanfaatkan baru sekitar 217 hektare[17]. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun volume produksi potensial dan dominasi produk unggulan ada, pemanfaatannya masih sangat terbatas, dan pekonomian nelayan terus berkurang oleh kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah nilai tukar nelayan yang rendah. Sebagai contoh, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur

mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga di angka 98,11%.

4 Tabel 6. Nilai Tukar Nelayan

Tahun	Nilai NTN
2019	125,84%
2020	95,48%
2021	100,88%
2022	101,78%
2023	98,11%

Sumber: Badan Pusat Statistik[18]

Nilai Tukar Nelayan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasar [19]. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya beli nelayan melemah karena harga yang dibayar nelayan (untuk bahan bakar, perbekalan, kebutuhan rumah tangga, dll.) meningkat lebih cepat daripada harga produk yang mereka terima. Meskipun penyerapan tenaga kerja tinggi, jika pendapatan rendah maka efeknya akan sangat kecil terhadap kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blue economy tidak berpengaruh signifikan* terhadap kemiskinan artinya *blue economy* belum mampu mengurangi kemiskinan di daerah pesisir Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan artinya penyerapan tenaga kerja belum mampu mengurangi kemiskinan di daerah pesisir Jawa Timur. Hanya 46,6% permasalahan kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel *blue economy* dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan cuaca, kebijakan pemerintah yang belum optimal, pendidikan, serta nilai tukar nelayan yang lemah. Untuk memberikan hasil yang optimal pemerintah dapat memberikan edukasi kepada nelayan mengenai alat untuk melaut agar hasil tangkapan lebih optimal dan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Memberikan edukasi kepada para pemuda agar memiliki pemikiran kreatif guna menciptakan lapangan kerja atau memanfaatkan sumber daya alam dengan optimal. Selain itu, dibutuhkan kesadaran di lingkungan pesisir agar keluar dari lingkaran kemiskinan dengan bergerak dari kondisi akrab. Masyarakat pesisir perlu berinovasi teknologi maupun mental untuk mengubah perekonomian dan keluar dari jebakan kemiskinan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- [1] "BPS Tingkat Kemiskinan," bps.go.id. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/>
- [2] M. F. Julyandi, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Sci. Manag. Students Res. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 196–203, 2020, doi: 10.33087/sms.v2i3.88.
- [3] M. Arifin and K. Amri, "Penyerapan Tenaga Kerja Industri Mikro Kecil Dan Penurunan Tingkat Kemiskinan: Bukti Data Panel Di Provinsi Riau," *Selodang Mayang J. Ilm. Badan Perenc. Pembang. Drh. Kabupaten Indragiri Hilir*, vol. 10, no. 2, pp. 125–132, 2024, doi: 10.47521/selodangmayang.v10i2.420.
- [4] E. Yustitia, A. M. Thoriq, and H. Ardiansyah, "Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Purwakarta Periode 2011 – 2020," *J. Maps (Manajemen Perbank. Syariah)*, vol. 6, no. 1, pp. 43–52, 2022, doi: 10.32627/maps.v6i1.574.
- [5] M. S. Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah," *J. Din. Ekon. Pembang.*, vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.v2.1.30-45.
- [6] E. A. Donesia, P. Widodo, H. J. R. Saragih, P. Suwarno, and Widodo, "Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia," *J. Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 1950–1959, 2023.
- [7] A. F. N. Ilma, "Blue Economy : Kesimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan," *J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 14, no. 1, 2016, doi: 10.20961/jiep.v14i1.2112.
- [8] "DKP Hasil Kelautan dan Perikanan," dkp.jatimprov.go.id. [Online]. Available: <https://dkp.jatimprov.go.id/>

- [9] N. Lubis, A. Y. Harahap, N. Faridy, and M. R. Arrasyid, "Peran Inklusi Keuangan dalam Memediasi Pengaruh Ekonomi Kreatif dan Blue Economy terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Pesisir," vol. 21, no. 3, pp. 185–198, 2025.
- [10] T. Apriliana, A. N. Fathonah, and M. Ali, "Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 1, p. 512, 2024, doi: 10.33087/ekonomis.v8i1.1528.
- [11] D. A. Sutomo and E. Horas, "Investment and Labor Absorption on Poverty Levels through the Dynamics of Economic Growth in West Papua," vol. 13, no. 4, pp. 985–1000, 2025, doi: 10.37641/jiakes.v13i4.3524.
- [12] M. Griselda, D. Papur, G. A. Sitorus, E. Amelia, T. Saribu, and J. Wuri, "Konservasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta," *Pros. Senapas*, vol. 2, no. 1, pp. 99–103, 2024.
- [13] M. Waruwu, S. N. Pu`at, P. R. Utami, E. Yanti, and M. Rusydiana, "Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 917–932, 2025, doi: 10.29303/jipp.v10i1.3057.
- [14] B. M. Putra, E. W. Suri, W. A. Saputra, E. Manalu, and G. A. Banjarnahor, "Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik KEMISKINAN DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU : AKAR MASALAH DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Oleh : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan P," *J. Penelit. Sos. dan Polit.*, vol. 12, no. 2, pp. 230–260, 2023.
- [15] M. A. Najib, Siti Nurjannah, and I Dewa Made Satya Parama, "Menyingkap Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kuranji di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat," *Pros. Semin. Nas. Mhs. Sociol.*, vol. 2, 2024.
- [16] A. F. Faletahan, M. F. Mauludin, and A. K. Hakim, "Studi Kualitatif tentang Jebakan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir di Pasuruan, Jawa Timur," *Bul. Ilm. Mar. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 8, no. 1, p. 73, 2022, doi: 10.15578/marina.v8i1.10960.
- [17] "Radar Bangkalan Rumput Laut," Jawa Pos. [Online]. Available: <https://share.google/OdMxivYohhGsJG0x7>
- [18] "BPS NTN," jatim.bps.go.id. Accessed: Sep. 20, 2025. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id>
- [19] R. C. Panjaitan, "Model Dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan (Kasus Kabupaten Karangasem)," *SOCA Socioecon. Agric. Agribus.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–8, 2012.